

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan media potensial bagi perusahaan untuk mengakomodasikan kepada stakeholder informasi yang dihasilkan dari transaksi yang dilakukan perusahaan (Puguh 2000). Saat ini Pengungkapan Laporan Keuangan (*disclosure of financial stetment*) menjadi salah satu isu menarik dalam dunia bisnis. Laporan keuangan menggambarkan kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan merupakan sumber informasi bagi investor disamping informasi lain, seperti informasi industri, kondisi perusahaan, pangsa pasar perusahaan, likuiditas manajemen dan lainnya.

Financial Accounting Standard Board (FASB) merumuskan tujuan laporan keuangan dalam bentuk, *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No 1 Tahun 1978. Pertama adalah pelaporan keuangan dapat menyediakan menyediakan informasi bagi investor, kreditur, dan pemakai internal lainnya untuk pengambilan investasi, kredit dan lainnya. Kedua, pelaporan keuangan dapat menyediakan informasi mengenai prospek arus kas untuk membantu investor dan kreditur dalam menilai prospek arus kas bersih perusahaan yang bersangkutan. Tujuan terakhir adalah pelaporan keuangan dapat

memberikan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan sumber daya tersebut.

Dari laporan keuangan tersebut akan didapat informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang memungkinkan investor untuk mengambil keputusan secara rasional sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Saat ini ruang lingkup informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan semakin diperluas, tidak hanya memberikan informasi konvensional yang terbatas pada angka-angka akuntansi tetapi laporan keuangan harus dapat mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan dengan cara menampilkan kinerja perusahaan secara lengkap. Perusahaan dihimbau untuk bertanggungjawab terhadap pihak yang lebih luas dari kelompok pemegang saham dan kreditor saja.

Laporan keuangan dapat dikelompokkan dalam pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang sifatnya sukarela (*voluntary disclosure*), pengungkapan wajib merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan atau institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan menurut standar yang berlaku. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela ini tidak disyaratkan oleh standar, tetapi diharapkan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya.

Pengungkapan sukarela muncul karena adanya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar, keberhasilan perusahaan tidak pada laba semata tetapi juga berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Pelaporan non keuangan ini secara umum telah diakomodasi dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam PSAK No. 1 (revisi 1998) paragraf sembilan tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri". Pernyataan PSAK di atas merupakan manifestasi kepedulian akuntansi akan masalah-masalah sosial yang merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan. Perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitarnya, terutama perusahaan industri yang menghasilkan limbah yang apabila tidak diolah secara benar akan mencemari lingkungan sekitar.

Untuk itu sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. Menurut Ketua IAI-KAM, Ali Darwin, pada saat ini berkembang pelaporan perusahaan yang dikenal dengan *sustainability reporting* (SR). Dalam paradigma SR perusahaan harus melaporkan aspek keuangan, aspek sosial dan aspek sosial yang terjadi di perusahaan. Bahkan lebih jauh dari itu, perusahaan juga harus mampu menjaga *sustainability*-nya.

Perusahaan sebagai lembaga usaha tidak lepas dari masalah sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan pegawai, pengelolaan lingkungan terutama disekitar pabrik, pemantauan produksi dan masalah dengan masyarakat sekitar perusahaan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat

untuk hidup aman, tenang, kesejahteraan karyawan dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Aggraini, 2006).

Munculnya permintaan informasi mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan berkaitan dengan argumentasi bahwa secara eksplisit perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Menurut Gray dkk. dalam *Smithing* (2005), tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan ditengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumberdaya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi dampak globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta isu global warming yang sekarang sangat hangat diperbincangkan, perusahaan harus lebih serius dan terbuka memperhatikan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Perusahaan yang menjalankan CSR akan memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan di belahan dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Berbagai fenomena tersebut menyadarkan masyarakat dunia bahwa sumber daya alam terbatas dan oleh karenanya pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya seefisien mungkin dan memastikan

lainnya sumber daya itu tidak habis sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa yang akan datang.

Perkembangan CSR secara konseptual baru di kemas sejak tahun 1980-an yang dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut: (1) Maraknya fenomena "take over" antar korporasi yang kerap dipicu oleh keterampilan rekayasa finansial. (2) Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan simbol tumbangya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme secara global. (3) Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang, sehingga di tempat supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan perlakuan yang adil terhadap buruh. (4) Globalisasi dan menciutnya peran sektor publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyebabkan tumbuhnya LSM (termasuk asosiasi swasta) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan sampai pada kelestarian akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil. (5) Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa perusahaan menuju bisnis berkelanjutan.

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah laporan. Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung seperti : standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun auditorsnya). Di samping itu sektor pasar modal Indonesia juga kurang mendukung dengan belum adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham

perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki *Socially Responsible Investment* (SRI) Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001.

Pengakomodasian CSR belum dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan wajar oleh perusahaan dalam proses penilaian penilaian dampak sosial maupun dalam pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyak timbul konflik dan masalah pada industrial seperti demonstrasi dan protes yang menunjukkan ketidakpuasan. Berbagai elemen masyarakat di sekitar pabrik merasa terganggu akibat limbah dan polusi yang timbul sehingga memberi dampak yang negatif terhadap lingkungan. Para buruh yang seringkali melakukan mogok kerja dan demo akibat kebijakan upah dan pemberian fasilitas kesejahteraan yang diabaikan perusahaan tidak mencerminkan rasa keadilan. Berbagai kasus, seperti kasus beracun, makanan yang mengandung minyak babi, minuman dengan bahan pengawet berbahaya, bahkan pencemaran yang akhir-akhir ini terjadi menunjukkan ketidakharmonisan antara dunia usaha dengan konsumen.

Masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal-hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). CSR tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Kebanyakan perusahaan yang melakukan CSR itu karena kesungkapan atau cuma-cuma hasil. Belum banyak pelaku bisnis yang melakukan CSR tersebut sebagai

suatu yang strategis sehingga tidak menempatkannya dalam jantung strategi perusahaan. Masih banyak yang menganggapnya sebagai liabilitas dari pada aset yang akan menjadi daya dukung dalam keunggulan dalam bersaing. Kebanyakan perusahaan akan termotivasi melakukan CSR jika lingkungan tersebut (konsumen, investor dan stakeholder lainnya) memberikan reward (misal dalam bentuk harga yang mendukung atau harga jual saham yang tinggi) atas pelaksanaan CSR tersebut.

Intilah CSR di kalangan bisnis Indonesia merupakan istilah yang sedang trendy saat ini, bahkan riset yang dilakukan majalah SWA tahun 2005 menemukan CSR sebagai suatu konsep yang paling banyak (31,11%) diterapkan oleh perusahaan dalam tataran strategis di Indonesia (Hasibuan-Sedyono, 2006). Namun berbagai studi di dalam dan luar negeri menunjukkan tingkat pelaporan dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah.

Chapple and Moon (2005) membandingkan pelaporan CSR melalui website dari 50 perusahaan terbesar (dari segi pendapatan operasi) di tujuh negara yang termasuk Indonesia. Dari target sample perusahaan besar, maka perusahaan-perusahaan ini mempunyai stakeholders yang banyak sehingga seharusnya dilakukan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR di perusahaan-perusahaan tersebut semakin tinggi. Hasil studi mereka menemukan hanya 24% perusahaan di Indonesia yang melakukan kegiatan CSR, yang oleh studi tersebut dibagi menjadi tiga kategori keterlibatan di masyarakat, proses produksi dan hubungan kerja yang bertanggung jawab sosial. Dari 24% yang melaporkan yang melaporkan, sebagian besar (73%) tingkat pelaporannya rendah (1-2 halaman), 9% menengah (3-10 halaman), dan 18% ekstensif (lebih dari 10 halaman).

Hartanti (2003) meneliti pengungkapan sosial di laporan tahunan di perusahaan terbuka di Indonesia untuk periode 1999-2001. Peneliti menggunakan *content analyst* yaitu membandingkan pengungkapan sosial di laporan tahunan dengan pengungkapan daftar suatu pengungkapan sosial sebagai acuan. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan adalah relatif rendah.

Pengungkapan paling banyak adalah produk ketenagakerjaan, diikuti lingkungan di masyarakat, lingkungan dan terakhir energi. Relatif lebih banyak pengungkapan mengenai produk dan ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan masih mengutamakan mengungkapkan informasi yang berdampak langsung dengan kinerja perusahaan. Hartanti (2005) juga menemukan bahwa 80% yang diungkapkan adalah informasi yang positif mengenai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan masih dipandang sebagai suatu alat *public relation* dan bukan sarana akuntabilitas perusahaan terhadap *stakeholders*.

Hartanti (2007) melakukan penelitian lanjutan, kali ini menggunakan daftar yang didasarkan pada *Global Reporting Initiative (GRI) Guideline*. Pengungkapan dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan informasi lingkungan hidup dan pengungkapan manajemen lingkungan hidup. Sampel yang digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur, BUMN dan terbuka yang pernah menerima *ISO 26000* dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hartati (2007) menemukan bahwa rata-rata pengungkapan informasi lingkungan hidup relatif rendah, yaitu hanya 8,3 dari maksimum skor 30; demikian pula rata-rata pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup yang juga rendah, yaitu 2,6 dari maksimum skor 7.

Rendahnya pengungkapan informasi lingkungan dan sosial juga dikemukakan oleh Darwin (2006) : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Akuntansi Manajemen setiap tahun mengadakan *Indonesian Sustainability Reporting Awards (ISRA)*, yang menemukan bahwa hanya sekitar 10% dari perusahaan publik di Indonesia mengungkapkan informasi lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan 2004. Bahkan hanya beberapa perusahaan yang membuat laporan khusus tentang lingkungan dan sosial. Ini menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan CSR di Indonesia bisa jadi karena kondisi infrastruktur pendukung pelaporan CSR di Indonesia yang belum memadai.

Sementara perkembangan CSR di luar negeri sudah sangat populer. Bahkan di beberapa negara CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja suatu perusahaan dengan dicantumkannya informasi CSR didalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Hill dkk. (2007) dalam Widiastika (2008), CSR sudah selayaknya dipandang sebagai bagian strategi bisnis perusahaan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan menyelaraskan program CSR perusahaan tersebut dengan produk dan *image* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contohnya, perusahaan rokok bisa melakukan program kemitraan dengan para petani tembakau, perusahaan susu bisa melakukan program kemitraan dengan peternak sapi perah.

Beberapa penelitian empiris tentang praktek pengungkapan sosial perusahaan banyak berfokus di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan sedikit penelitian telah dilakukan di negara-negara lain seperti Kanada, Jerman, Jepang, New Zealand, Malaysia, dan Singapura. Kebanyakan penelitian empiris tentang

negara Amerika Serikat cenderung untuk menggunakan bukti survey empiris (Gray & Ernst (1978) dalam Achmad Zaenuddin (2006). Guthrie dan Parker (1983) yang memberikan bukti survey empiris yang lebih baru.

Gray et al. (1987, 1995a) dalam Achmad Zaenuddin (2006) memberikan bukti survey empiris di Inggris, kemudian penelitian selanjutnya yang mencakup negara-negara mulai dari 1979 sampai dengan 1991. Penelitian di Australia mencakup Thomas (1979) dan Guthrie (1983). Penelitian yang dilakukan oleh Davey (1982), Ng (1985) serta Hackston dan Milne (1996) telah memberikan beberapa penelitian bahwa ukuran perusahaan (*company size*) mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan di New Zealand. Penelitian Guthrie dan Parker (1983) dan Gray et al. (1995a) menggambarkan suatu perbedaan penting antara pengungkapan sukarela dan pengungkapan yang diwajibkan undang-undang.

Menurut Hackston dan Milne dalam Sembiring (2005), walaupun fenomena pengungkapan tanggungjawab sosial telah muncul lebih dari dua dekade, penelitian tentang praktik pengungkapan tanggung jawaban sosial seperti yang terpusat di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Penelitian praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia antara lain Sembiring (2005), Anggraini (2006), Achmad Zaenuddin (2006), Hardhina (2007), Aldilla (2009), dan sebagainya.

Dari berbagai hasil penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sangat beragam, hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap. Dari keseluruhan latar belakang diatas maka peneliti

menggunakan replikasi dari dua penelitian, yaitu penelitian dari Sembiring (2005) dan penelitian dari Puguh (2006). ini merupakan replikasi dari penelitian Sembiring (2005). Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian Sembiring (2005) dan Puguh (2006) yaitu :

1. Sampel yang diteliti oleh Sembiring (2005) menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sampel Puguh (2006) adalah perusahaan high profile dan low profile. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan mengkhususkan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Periode penelitian yang digunakan Sembiring (2005) yaitu tahun 2002, penelitian Puguh (2006) periode penelitiannya tahun 2001. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan periode penelitian dari tahun 2006 sampai 2009.
3. Dalam penelitian Sembiring (2005) menggunakan variabel size, profitabilitas, profil, dewan komisaris, leverage, sedangkan dalam penelitian ini terdapat tambahan variabel yaitu likuiditas.
4. Dalam penelitian Sembiring (2005) variabel yang digunakan adalah karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan, sedangkan dalam penelitian Puguh (2006) variabel yang digunakan adalah pengungkapan sosial terhadap reaksi investor. Dan dalam penelitian ini peneliti menggabungkan variabel dari dua penelitian tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian tentang pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan, misalnya

hasil penelitian Sembiring (2005) dan Sembiring (2003) bahwa size berpengaruh positif signifikan terhadap pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi hasil penelitian Anggraini (2006) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah size perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah profil perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
5. Apakah leverage perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
6. Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan pertanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur?
7. Apakah pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan manufaktur berpengaruh positif terhadap reaksi investor?

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh size perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
3. Menganalisis pengaruh profil perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
5. Menganalisis pengaruh leverage perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
6. Menganalisis pengaruh likuiditas perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan manufaktur go public di BEI
7. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan dalam pengungkapan sosial terhadap reaksi investor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan antara lain :

1. Penulis, memberikan modal atau bekal pengetahuan dalam memasuki dunia kerja.

2. *Perusahaan*, memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan, terutama perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia untuk memperhatikan lingkungan alam di sekitar perusahaan mereka, dalam rangka menjaga alam dan juga untuk mencapai *competitive advantage* di dunia pasar.
3. *Investor*, berguna dalam proses *decision making* dalam penanaman modalnya serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
4. *Akademisi*, Bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan.